

**THE ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE OF  
THE LOCAL GOVERNMENT IN PULAU MOROTAI REGENCY OF  
MALUKU UTARA PROVINCE**  
(Study on the Government of Pulau Morotai Regency in the Last Five Years 2011- 2015)

By:  
Nurhikmah Sibua<sup>1</sup>, Firman Pribadi<sup>2</sup>

MASTER'S PROGRAM OF MANAGEMENT OF GRADUATE FACULTY OF UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Bantul, Indonesia  
nhikmahsibua@yahoo.com

**ABSTRACT:** Local autonomy is an attempt to empower the region in the local decision making in a more flexible and responsible way to manage the resources possessed corresponding to the interest, priority, and local potential. However, in the implementation, there were various local problems faced by the government of Pulau Morotai Regency, among others: (1) the dependence of the local government on the subsidy of the central and provincial governments, (2) the low capability of the local government to discover the potential resources of local income reflected from the acceptance of local income that was relatively low compared to total local revenue, (3) the lack of attempt and ability of local revenue in the management and discovery of revenue sources existed, (4) the inefficiency of the local government in conducting the local expenditure. Based on the thoughts, the problems could be formulated in the research, i.e. how the financial management performance of the local government of Pulau Morotai Regency was, and what factors that influenced the success of financial management realization performance.

This research aimed at: (1) finding out the financial management performance of the local government of Pulau Morotai Regency, (2) finding out the factors that could be the obstacles for the success of financial management realization performance of the local government of Pulau Morotai Regency in 2011-2015.

The research on performance implementation analysis used descriptive qualitative method obtained from the budget realization report and local budget of the local government of Pulau Morotai Regency in 2011-2015, in the data analysis, started with data collection through the methods of interview, documentation, and observation.

The research result concluded that the financial management performance of the local government of Pulau Morotai Regency as the analysis result local finance ratios were decentralization degree ratio, dependence ratio, independence ratio in the last three years i.e. 2013, 2014 and 2015 the analysis result of the ratios showed high value, and the analysis of effectiveness ratio in the last five years 2011- 2015 the analysis result of local finance performance capability in general showed very effective value. Meanwhile, the obstacles of the success of finance management realization performance of the local government of Pulau Morotai Regency were the inaccuracy of potential data of local income, the very limited budget allocation, and the high dependence of the local government. Then, the solutions in the success of finance management realization performance of the local government of Pulau Morotai Regency were improving the management of local income, increasing the budget allocation, and increasing the coordination, socialization, coaching and controlling.

**Keywords:** *financial performance, financial ratio of the local budget.*

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

*(Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015)*

Oleh :

**Nurhikmah Sibua<sup>1</sup>, Firman Pribadi<sup>2</sup>**

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Bantul, Indonesia

nhikmahsibua@yahoo.com

**ABSTRAK:** Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Meskipun demikian, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan daerah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015.

Penelitian analisis implementasi kinerja ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015, dalam analisis data, diawali dengan menghimpun data melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah yakni; rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio-rasio menunjukkan nilai yang tinggi, dan analisis rasio efektivitas dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011-2015 hasil analisis kemampuan kinerja keuangan daerah secara umum menunjukkan nilai sangat efektif. Adapun yang menjadi hambatan dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni; ketidakakuratan data potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimnya pengalokasian anggaran, dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah. Dan solusi dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni memperbaiki manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengalokasian anggaran, dan meningkatkan koordinasi, sosialisasi, pembinaan serta pengendalian.

**Kata kunci:** *kinerja keuangan, rasio keuangan APBD.*